

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa pemerintah daerah bersama DPRD diberikan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan ada beberapa urusan yang oleh Undang-Undang menjadi urusan pemerintah yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama. Selain itu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Dukungan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan menyediakan sumber pendanaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Pendanaan antara pemerintah dan pemerintahan daerah dibagi secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Seperti halnya organisasi sektor privat, organisasi sektor publik yang dalam hal ini pemerintahan juga memerlukan anggaran dalam pengelolaan dan pelaksanaan program-programnya. Perbedaannya terletak pada karakteristik anggaran. Pada sektor publik, anggaran bukanlah rahasia negara sehingga

dibuat dan dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan, sebaliknya pada sektor privat anggaran merupakan rahasia perusahaan sehingga bersifat tertutup. Anggaran merupakan sejumlah rencana kegiatan yang ditargetkan akan dicapai oleh manajer suatu perusahaan dalam periode yang akan datang.

Perangkat pemerintah daerah yang dalam hal ini disebut juga dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terdiri atas berbagai instansi seperti Dinas, Badan, Kecamatan, dan Inspektorat. Setiap SKPD tentunya memiliki anggaran masing-masing untuk menjalankan programnya. Anggaran sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku-perilaku manajer, yaitu perilaku positif ataupun perilaku negatif (Sari,dkk, 2019). Ketika seorang manajer bertindak sejalan dan seimbang dengan tujuan perusahaan (*goal congruence*) maka akan menimbulkan perilaku positif. Sebaliknya, ketika manajer melakukan senjangan anggaran maka hal tersebut merupakan perilaku negatif (Puspitha, 2017).

Anggaran menjadi salah satu fokus dalam perencanaan jangka pendek dan menjadi sistem pengendalian organisasi. Kinerja pemerintah dinilai dari seberapa kompeten pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi wewenangnya. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dilihat dari cara pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh wewenang mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan atas tugas dan fungsinya dalam merealisasikan visi, misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga penetapan anggaran dapat terbentuk untuk dapat

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002) dalam Erina dan Suartana (2016) diperlukan prinsip akuntabilitas dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai bentuk pengalokasian anggaran agar merepresentasikan aspek 3E (ekonomis, efisien, dan efektivitas) dalam pengelolaan anggaran.

Senjangan anggaran merupakan adanya perbedaan antara laporan anggaran yang dilaporkan dengan anggaran yang sesungguhnya dari suatu organisasi. Menurut Lestiana (2016) dalam Puspitha (2017) hal ini terjadi ketika anggaran diajukan dengan merendahkan pendapatan dan meninggikan biaya yang bertujuan untuk memudahkan organisasi dalam mencapai target. Menurut Halim dan Abdullah (2006) dalam Puspitha (2017) pemerintah seringkali mendapat permasalahan terkait anggaran seperti kepala unit dinas pemerintah membuat dan menetapkan anggaran lebih besar dari pengeluaran sesungguhnya, mengusulkan suatu kegiatan yang bukan prioritas untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, mengalokasikan pembelajaran yang bukan merupakan keperluan khusus untuk suatu kegiatan, mengalokasikan anggaran kegiatan dengan jumlah yang terlalu besar untuk komponen belanja, dan membuat anggaran dengan nilai yang diperbesar untuk kegiatan yang hasilnya tidak dapat diukur. Pernyataan diatas dirasa selaras dengan permasalahan yang sering timbul di pemerintah daerah yaitu aksi-aksi demo oleh masyarakat yang diserukan akibat tidak adanya perbaikan infrastruktur dan lain-lain, sedangkan pemerintah pusat memberikan pendanaan yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya, namun

masyarakat masih belum merasakan infrastruktur yang baik. Permasalahan tersebut timbul dapat dikarenakan adanya perbedaan wewenang antara bawahan dan atasan. Dalam proses penyusunan anggaran, atasan menetapkan segala hal terkait anggaran yang harus dijalankan oleh bawahan. Hal ini mengakibatkan kinerja bawahan menjadi tidak efektif karena bawahan hanya melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh atasan.

System pemerintahan yang diterapkan sekarang yaitu desentralisasi, dimana system ini menyebabkan perubahan dalam penyusunan anggaran. Dalam penyusunan anggaran daerah dilakukan oleh badan eksekutif (agen) dan kemudian disahkan oleh badan legislatif (principal). Bawahan akan cenderung melakukan senjangan anggaran demi karir yang terlihat meningkat ketika penilaian kinerja berdasarkan target anggaran. Senjangan anggaran telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Banyaknya permasalahan yang dapat menyebabkan terjadinya senjangan anggaran mengakibatkan perlu adanya perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu perlu dilakukannya reformasi penganggaran, perubahan dari system anggaran tradisional menjadi system anggaran berbasis kinerja yang disebut dengan konsep *New Public Management* (NPM). System anggaran berbasis kinerja lebih efisien dan partisipatif sehingga diharapkan kinerja agen dapat lebih optimal. Agen akan cenderung melakukan senjangan anggaran ketika penilaian kinerja didasarkan pada target anggaran, yaitu dilakukan dengan mengecilkan pendapatan dan

meningkatkan biaya pengeluaran sesungguhnya. Perkembangan anggaran pendapatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1

Realisasi APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2013-2016

| Tahun | Anggaran Pendapatan Daerah (Rp'000) | Realisasi Pendapatan Daerah | Anggaran Belanja Daerah (Rp'000) | Realisasi Belanja Daerah |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 2013 | 1.462.967.582 | 1.486.773.783.371 | 1.647.297.208 | 1.477.106.031.341 |
| 2014 | 1.652.375.217 | 1.687.338.257.907 | 1.832.302.594 | 1.615.850.550.570 |
| 2015 | 1.947.424.255 | 1.966.423.490.803 | 2.017.362.915 | 1.777.978.292.423 |
| 2016 | 2.264.674.144 | 2.112.514.280.374 | 2.157.722.824 | 1.843.048.079.592 |

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat terlihat adanya indikasi terjadinya senjangan anggaran. Realisasi pendapatan daerah rata-rata lebih tinggi dari anggaran pendapatan yang ditargetkan. Hal tersebut dilakukan agar dapat terlihat kinerja sumber daya yang baik, karena realisasi pendapatan melampaui anggaran atau target yang ditetapkan.

Menurut Hasanah dan Suartana (2014) senjangan anggaran dilakukan dengan disembunyikannya informasi-informasi dari atasan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan teori agensi, target pendapatan yang akan dicapai cenderung dibuat lebih rendah sehingga anggaran akan lebih mudah untuk dicapai, hal tersebut dibuktikan dengan tercapainya realisasi anggaran yang dibuat cenderung lebih besar, sehingga terjadi peningkatan atas persepsi kinerja. Lain halnya dengan pengeluaran, anggaran belanja yang dicapai akan cenderung dibuat lebih tinggi, sedangkan realisasinya lebih rendah dari yang dianggarkan, hal tersebut mengindikasikan adanya senjangan anggaran.

Al-Quran menjelaskan bahwa manusia harus bersikap adil dan tetap berada pada jalan kebenaran, serta menyampaikan suatu hal dengan sebenar-benarnya karena meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S An-Nisa (4): 135

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ ءَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْتُمْ أَوْ نَعَضْتُمُ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Q.S An-Nisa ayat 135 menjelaskan bahwa Allah SWT meminta hambanya untuk tetap menegakkan keadilan, tidak berpaling dari keadilan, saling mendukung dan tolong-menolong untuk keadilan. Allah juga menginginkan hambanya untuk menjadi saksi yang benar, adil, hak serta bersih dari penyimpangan, perubahan, dan kepalsuan, sekalipun hal itu akan membahayakan diri sendiri karena Allah pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap perkara. Hawa nafsu untuk berperilaku menyimpang dari kebenaran

harus dihilangkan, dan tetap pada keadilan dalam keadaan apapun karena keadilan lebih dekat dengan takwa.

Penelitian terdahulu mengenai senjangan anggaran telah banyak dilakukan dengan hasil yang beragam. Penelitian Sari,dkk (2019), Erina dan Suartana (2016) partisipasi anggaran, penekanan anggaran. Dianthi dan Wirakusuma (2017) asimetri informasi, komitmen organisasi. (Oksanda, 2015) Budaya Organisasi. Penelitian ini mengambil hasil penelitian dari Sari,dkk (2019) sebagai acuan dengan variabel partisipasi anggaran, asimetri informasi, penekanan anggaran dan komitmen organisasi sebagai variabel independen. Kontribusi dalam penelitian ini terletak pada perbedaan penggunaan sampel yaitu SKPD di Kabupaten Pematang dan penambahan variabel budaya organisasi sebagai variabel moderasi.

Motivasi dalam penelitian ini yaitu adanya hasil yang inkonsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. Sari,dkk (2019) meneliti senjangan anggaran sebagai variabel dependen dan partisipasi anggaran, asimetri informasi, *budget emphasis*, komitmen organisasi sebagai variabel independen. Hasil penelitian menurut Sari,dkk (2019) partisipasi anggaran dan penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran sedangkan asimetri informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Hasil penelitian partisipasi anggaran dan penekanan anggaran ini didukung oleh penelitian Erina dan Suartana (2016) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran dan penekanan anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irfan,dkk

(2016) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan penekanan anggaran berpengaruh negatif. Irfan,dkk (2016) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif sedangkan pada penelitian Puspitha (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif dan komitmen organisasi berpengaruh negatif. Hasil penelitian Audia dan Jatmiko (2017) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran, sedangkan hasil penelitian dari Dianthi dan Wirakusuma (2017) budaya organisasi berpengaruh negatif, sama dengan penelitian Oksanda (2015) budaya organisasi berpengaruh negatif tetapi tidak memoderasi partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.

Melalui partisipasi penyusunan anggaran diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajer atau bawahan. Partisipasi anggaran dapat menambah informasi dan mengurangi ambiguitas peran dalam perbaikan kinerja. Hal ini akan meningkatkan kerjasama banyak pihak, baik manajer tingkat atas hingga manajer tingkat bawah. Partisipasi anggaran merupakan proses dimana individu-individu didalam organisasi terlibat dan berpengaruh pada penyusunan anggaran, kemudian akan dievaluasi kinerjanya dan dihargai berdasarkan pencapaian target anggaran (Dianthi dan Wirakusuma, 2017). Ketika proses partisipasi penyusunan anggaran dilakukan secara efektif, maka akan timbul pertukaran informasi yang baik untuk mendapatkan hasil anggaran yang disetujui bersama dengan berdasar kemampuan dan pengetahuan pembuat anggaran yang mengetahui lingkungan sekitar.

Asimetri informasi antara agen dan prinsipal juga dapat terjadi ketika proses penyusunan anggaran. Asimetri informasi merupakan perbedaan atau selisih informasi antara atasan dan bawahan yang disebabkan adanya sumber maupun akses yang berbeda dari informasi terkait (Sari,dkk, 2019). Agen (bawahan) yang diikutsertakan dalam penyusunan anggaran bias saja mengungkapkan sejumlah informasi pribadi dalam anggaran, ataupun justru menutupi informasi-informasi sehingga dapat mengindikasikan adanya senjangan anggaran. Penelitian Irfan,dkk (2016) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh negatif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Puspitha (2017) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif.

Penekanan anggaran merupakan keadaan dimana anggaran menjadi faktor prioritas dalam mengukur kinerja bawahan pada organisasi (Apriantini, dkk, 2014). Bawahan akan mencoba melakukan senjangan anggaran apabila penghargaan (*reward*) akan didapatkan ketika berhasil mencapai target anggaran. Seperti yang dijelaskan Suartana (2010) dalam Erina dan Suartana (2016) tentang “faktor penekanan anggaran yang dapat menyebabkan terjadinya budgetary slack, yaitu sering kali organisasi memakai anggaran sebagai satu-satunya alat ukur dalam kinerja manajemen. Suatu penilaian kinerja dengan cara melihat terpenuhi atau tidaknya sasaran anggaran akan mendorong bawahan untuk menimbulkan senjangan (*slack*) anggaran. Tujuannya yaitu meningkatkan prospek kompensasi dimasa yang akan datang.” Hasil penelitian Erina dan Suartana (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif dari penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Irfan,dkk (2016) yang menyatakan adanya pengaruh negatif antara penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran.

Senjangan anggaran juga dapat dipengaruhi faktor lain yaitu komitmen organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen organisasi diharapkan dapat bersikap positif dan melakukan yang terbaik atas kinerjanya dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Penelitian Nopriyanti (2016) menyatakan adanya pengaruh positif komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran, lain hal dengan penelitian Puspitha (2017) yang menunjukkan adanya pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran.

Budaya organisasi dapat menyebabkan semua anggota organisasi merasa benar-benar menjadi bagian dari organisasi dan bertanggungjawab atas kemajuan organisasi (Oksanda, 2015). Secara tidak langsung, budaya organisasi akan mengurangi perilaku disfungsional dalam penyusunan anggaran. Penelitian Dianthi dan Wirakusuma (2017) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif pada senjangan anggaran, sedangkan dalam penelitian Audia dan Jatmiko (2017) menyebutkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh pada senjangan anggaran.

Penelitian ini menggunakan variabel budaya organisasi sebagai variabel moderasi, dimana budaya organisasi memoderasi antara pengaruh komitmen organisasi terhadap senjangan anggaran. Hal ini dikarenakan pada beberapa penelitian menghasilkan bahwa budaya organisasi berpengaruh

negatif atau ada juga beberapa hasil yang tidak berpengaruh terhadap senjangan anggaran. Pada beberapa penelitian, komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderasi meskipun ada juga yang menghasilkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif. Hal ini menimbulkan opini peneliti bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran dengan dimoderasi oleh budaya organisasi. Seseorang dengan komitmen yang tinggi dan didukung dengan budaya-budaya dalam organisasi yang baik, maka akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran, begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang memiliki kinerja yang baik dalam mencapai tujuan organisasi berdasarkan anggaran, dan budaya yang ada juga mendukung seperti keterbukaan, kejujuran serta lingkungan kerja yang positif maka senjangan anggaran dapat diminimalisir.

Peneliti memilih hanya variabel komitmen organisasi yang dimoderasi oleh budaya organisasi karena dari hasil beberapa penelitian bahwa variabel komitmen organisasi dijadikan sebagai variabel moderasi. Menurut opini peneliti, bahwa senjangan anggaran dapat terjadi saat penyusunan anggaran maupun ketika pelaksanaan anggaran, komitmen organisasi diperlukan atau dapat mempengaruhi anggaran yang telah ditetapkan, dan budaya organisasi mampu mempengaruhi hubungan komitmen organisasi dengan senjangan anggaran karena dengan komitmen yang baik dan budaya yang baik akan mengurangi terjadinya senjangan anggaran. Sedangkan variabel lain seperti asimetri informasi, partisipasi anggaran dan penekanan anggaran, peneliti sependapat dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menghasilkan

bahwasanya variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran. Peneliti ingin membuktikan pada sampel yang berbeda yaitu pada SKPD di Kabupaten Pematang Jaya.

B. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan anggaran semakin banyak terjadi. Pemerintah daerah selalu menganggarkan pengeluaran yang semakin bertambah besar jumlahnya dengan berbagai macam program yang diusulkan oleh pemerintah. Disisi lain, aksi demo masyarakat menuntut hak mereka baik atas masalah ekonomi, infrastruktur maupun yang lainnya terus terjadi. Senjangan anggaran disebut sebagai salah satu permasalahan yang diindikasikan terjadi atas pembuatan anggaran. Berdasarkan hasil *research gap* penelitian diatas yang inkonsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi senjangan anggaran. Perumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran?
- 2) Apakah Penekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran?
- 3) Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran?
- 4) Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran?

- 5) Apakah Budaya Organisasi memperkuat pengaruh hubungan Komitmen Organisasi terhadap senjangan anggaran?

C. MOTIVASI PENELITIAN

Peneliti termotivasi untuk mengangkat judul ini karena adanya fenomena pembuatan anggaran lebih tinggi dari realisasinya. Anggaran atas pendapatan dibuat lebih rendah dari realisasinya dan pengeluaran atau belanja dianggarkan lebih tinggi dari realisasinya. Hal ini didasarkan pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pemalang yang diakses melalui website Kabupaten Pemalang. Diliat dari tahun ke tahun pendapatan yang diperoleh pemerintah semakin bertambah jumlahnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Pemalang dirasa kurang transparan kepada masyarakat, salah satunya pada website pemerintah Pemalang yang seharusnya diupdate agar masyarakat dapat melihat laporan keuangan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat yang dapat berdampak pada timbulnya aksi demo atas tuntutan hak mereka. Dari pernyataan tersebut maka diindikasikan terjadinya senjangan anggaran

Oleh karenanya, perlu dilakukan pengujian dengan mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran tidak semestinya terjadi pada organisasi, tak terkecuali pada pemerintah daerah yang seharusnya mampu bersikap akuntabilitas dan resposibilitas. Dimana anggaran dibuat dengan kondisi yang sebenarnya, bukan semata-mata agar terlihat baik.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji studi empiris apakah Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.
- 2) Untuk menguji studi empiris apakah Penekanan Anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.
- 3) Untuk menguji studi empiris apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran.
- 4) Untuk menguji studi empiris apakah Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran.
- 5) Untuk menguji studi empiris apakah Budaya Organisasi memperkuat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap senjangan anggaran.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Akademisi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi faktor-faktor yang mempengaruhi senjangan anggaran serta memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan senjangan anggaran

- 2) Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya pengungkapan senjangan anggaran serta dapat

menjadi masukan dalam pertimbangan pengambilan keputusan perusahaan terkait pembuatan anggaran.

3) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi dalam pembuatan anggaran dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya senjangan anggaran agar tercipta akuntabilitas dan responsibilitas yang baik pada pemerintah.

4) Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran.